

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penganggaran merupakan isu penting di setiap negara. Hal ini dikarenakan anggaran mencerminkan seluruh pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Penganggaran pula merupakan penciptaan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Menurut Halim (2016:92), anggaran merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Salah satu isu terkait yang sering diangkat dalam membahas anggaran adalah realisasi anggaran, yang mana merupakan tolok ukur kinerja atau anggaran itu sendiri. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lestari (2015:1), pencapaian target kinerja terutama anggaran merupakan tugas penting dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlomba-lomba untuk

mencapai target anggaran dengan memaksimalkan pelayanan publik. Namun pada kenyataannya masih banyak SKPD yang masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan sehingga anggaran pemerintah daerah masih banyak yang tidak terserap sampai akhir tahun. Di sisi lain surplus/defisit anggaran tidak selalu mencerminkan baik buruknya kinerja keuangan.

Penyusunan anggaran merupakan pola yang berkelanjutan di setiap tahunnya, namun harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan inflasi, hal ini yang menyebabkan anggaran perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian anggaran dapat berupa penambahan atau pengurangan anggaran. Namun, yang lazim terjadi adalah penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Menurut Abdullah & Nazry (2014:25) pada dasarnya, tidak semua daerah perlu melakukan perubahan anggaran. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak perlu melakukan perubahan anggaran, disebabkan tingginya anggaran APBD murni. Ada pula beberapa Kabupaten/Kota yang memerlukan APBD perubahan sehingga dapat membantu mempercepat realisasi anggaran. Hal ini sesuai dengan data realisasi anggaran DPPK Kabupaten Bandung yang mana dalam beberapa tahun anggaran tidak melakukan perubahan anggaran, dan dalam beberapa tahun anggaran lainnya melakukan perubahan anggaran.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sebagai SKPD dan juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, penulis menemukan permasalahan yang berkaitan dengan realisasi anggaran. Untuk realisasi anggarannya, pada setiap tahunnya memiliki prosentase realisasi yang fluktuatif. Hal ini sesuai dengan data realisasi anggaran DPPK Kabupaten Bandung dari periode 2007 sampai dengan 2015.

Tabel 1.1
Prosentase Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2007-2015

No.	Tahun Anggaran	Realisasi		Target (%)		Ket.
		Rp.	%	Min.	Maks.	
1	2007	1.799.975.720.460,00	91,99	96	100	Tidak tercapai
2	2008	1.480.102.230.212,00	91,27	95,81	100	Tidak tercapai
3	2009	1.784.808.639.830,38	91,22	87,09	100	Tercapai
4	2010	2.104.315.600.811,70	87,25	86,82	100	Tercapai
5	2011	2.460.240.275.222,00	92,64	87,25	100	Tercapai
6	2012	2.850.023.261.378,00	93,04	93,04	100	Tercapai
7	2013	3.242.165.132.570,50	91,16	90,53	100	Tercapai
8	2014	3.823.064.504.314,00	88,07	91	100	Tidak tercapai
9	2015	4.607.334.886.117,81	89,60	91,5	100	Tidak tercapai

Sumber: Ringkasan LRA Kabupaten Bandung Tahun 2007-2015 (diolah oleh penulis)

Dilihat dari tabel 1.1 diatas pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, target realisasi anggaran dapat tercapai yaitu pada tahun 2009 dengan target 87,09% dan tercapai sebesar 91,22%, tahun 2010 dengan target 86,82% dan tercapai sebesar 87,25%, tahun 2011 dengan target 87,25% dan tercapai sebesar 92,64%, tahun 2012 dengan target 93,04% dan tercapai sebesar 93,04%, dan pada tahun 2013 dengan target 90,53% dan tercapai 91,16%. Sedangkan pada tahun anggaran 2007, 2008, 2014 dan 2015, realisasi anggaran tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2007 dengan target 96% hanya dapat terealisasi sebesar 91,99%, tahun 2008 dari target 95,81% hanya dapat terealisasi sebesar 91,27%, pada tahun 2014 dari target 91% hanya dapat terealisasi sebesar 88,07%, dan pada tahun 2015 dari target 91,5% hanya dapat terealisasi sebesar 89,60%.

Pada tahun 2007, 2008, 2014 dan 2015 realisasi anggaran tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: 1) adanya beberapa program dan kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu; dan 2)

adanya efisiensi-efisiensi anggaran pada SKPD namun tidak berpengaruh pada pencapaian kinerja. (LAKIP DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2014:5)

Realisasi anggaran yang rendah dapat pula terjadi akibat APBD murni yang ditargetkan terlalu rendah atau APBD perubahan yang terlalu besar sehingga anggaran tidak mampu terealisasi dengan optimal bahkan persentase realisasi atau serapan anggaran menjadi turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun nominal anggaran meningkat.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah alokasi belanja daerah Kabupaten Bandung sebelum perubahan (murni) dari tahun 2007 hingga 2015.



Tabel 1.2

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Sebelum Perubahan Tahun 2007-2015

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	+ / (-) dari Tahun Sebelumnya (Rp.)	Target (%)		Realisasi		Ket.
				Min	Mak	Rp.	%	
1	2007	1.962.177.060.799,00	21,22	96	100	1.799.975.720.460,00	91,73	Tdk tercapai
2	2008	1.553.765.634.325,00	(20,81)	95,81	100	1.480.102.230.212,00	95,36	Tdk tercapai
3	2009	1.704.151.631.360,00	9,68	87,09	100	1.784.808.639.830,38	104,73	Tercapai
4	2010	2.093.853.549.644,00	22,87	86,82	100	2.104.315.600.811,70	100,50	Tercapai

5	2011	2.350.772.521.066,00	12,27	87,25	100	2.460.240.275.222,00	104,66	Tercapai
6	2012	2.645.284.571.118,60	12,53	93,04	100	2.850.023.261.378,00	107,74	Tercapai
7	2013	2.803.353.393.577,35	5,98	90,53	100	3.242.165.132.570,50	115,65	Tercapai
8	2014	4.329.971.358.081,78	54,46	91	100	3.823.064.504.314,00	88,29	Tdk tercapai
9	2015	4.402.405.669.627,15	1,67	91,5	100	4.607.334.886.117,81	104,65	Tercapai

Sumber: Ringkasan LRA Kabupaten Bandung Tahun 2007-2015 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2007 hingga 2015 terjadi peningkatan jumlah alokasi belanja daerah Kabupaten Bandung. Pada tahun anggaran 2008, alokasi belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2008 alokasi belanja daerah sebesar Rp.1.553.765.634.325,00 sedangkan pada tahun anggaran sebelumnya yakni tahun 2007 alokasi belanja daerah sebesar Rp.1.962.177.060.799,00 atau terjadi penurunan sebesar 20,81%. Perubahan anggaran terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan alokasi belanja murni sebesar Rp.4.329.971.358.081,78, sedangkan alokasi belanja murni pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2012 hanya sebesar Rp.2.803.353.393.557,35 dengan kata lain terjadi kenaikan alokasi sebesar 54,46% dari alokasi belanja tahun sebelumnya.

Jika alokasi belanja murni dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka dapat dilihat dari tabel 2.1 bahwa setiap tahunnya capaian alokasi belanja murni bersifat fluktuatif. Tahun 2007, 2008 dan tahun 2014 realisasi anggaran tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2007 dari target 96% hanya terealisasi sebesar 91,73%, tahun 2008 dari target 95,81% hanya tercapai sebesar 95,36%, dan pada tahun 2014 dari target 91% hanya tercapai 88,29%.

Pada saat pelaksanaannya sering terjadi perubahan atas rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lee & Plummer (dalam Lestari, 2015:10) menyatakan bahwa

administrator menyesuaikan anggarannya sebagai cara untuk memprediksi kenaikan beban. Penyesuaian anggaran dapat menjadi alat untuk alokasi biaya dan memaksimalkan pendapatan.

Adanya anggaran perubahan merupakan bukti bahwa adanya kenaikan belanja daerah. Penyesuaian terhadap kenaikan belanja tersebut menjadi perhatian utama. Yang mana, mencerminkan hal yang lazim dilakukan sehingga SKPD tidak terbebani dalam menetapkan APBD murni. Padahal, anggaran perubahan dilakukan ketika adanya penyerapan anggaran yang terlampaui anggaran di tahun sebelumnya. Pada dasarnya, tidak semua daerah perlu melakukan perubahan anggaran, namun ada pula yang memerlukan APBD perubahan sehingga dapat membantu mempercepat realisasi anggaran. Hal ini sesuai dengan data realisasi anggaran Kabupaten Bandung dari beberapa periode anggaran tahun 2007-2015.

Tabel 1.3

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Setelah Perubahan Tahun 2007-2015

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/(Berkurang) Dari Anggaran Murni		Target (%)		Realisasi (%)	Keterangan
			(Rp.)	%	Min	Mak		
1	2007	1.956.802.088.268,00	(5.374.972.531)	(0,27)	96	100	91,99	Tdk tercapai
2	2008	1.621.644.167.602,00	67.878.533.277	4,37	95,81	100	91,27	Tdk tercapai
3	2009	1.956.686.979.054,00	252.535.347.694,00	14,82	87,09	100	91,22	Tercapai
4	2010	2.411.781.556.958,00	317.928.007.314,00	15,18	86,82	100	87,25	Tercapai
5	2011	2.655.561.941.414,00	304.789.420.348,00	12,97	87,25	100	92,64	Tercapai
6	2012	3.063.111.044.168,65	417.826.473.050,05	15,80	93,04	100	93,04	Tercapai
7	2013	3.556.435.069.635,98	753.081.676.078,63	26,86	90,53	100	91,16	Tercapai
8	2014	4.340.959.468.801,78	10.988.110.720,00	0,25	91	100	88,07	Tdk tercapai
9	2015	5.142.388.330.904,74	739.982.661.277,59	16,81	91,5	100	89,60	Tdk tercapai

Sumber: Ringkasan LRA Kabupaten Bandung Tahun 2007-2015 (diolah oleh penulis)

Dilihat dari tabel 1.3 diatas bahwa alokasi belanja daerah di Kabupaten Bandung dari tahun anggaran 2007-2015 setiap tahunnya mengalami perubahan. Dari perubahan tersebut, mayoritas anggaran yang ditetapkan menjadi bertambah dari alokasi belanja daerah murni, hanya pada tahun anggaran 2007 saja alokasi belanja perubahan menjadi berkurang dari pada alokasi belanja daerah murni. Pada tahun 2007 alokasi belanja perubahan berkurang sebesar Rp.5.374.972.531 atau 0,27% dari alokasi belanja daerah murni. Pada tahun 2013, alokasi belanja daerah mengalami perubahan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu bertambah sebesar Rp.753.081.676.078,63 atau 26,86% dari alokasi belanja daerah murni. Pertambahan anggaran yang paling kecil terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp.10.988.110.720,00 atau 0,25% dari alokasi belanja daerah murni.

Pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, target realisasi anggaran dapat tercapai yaitu pada tahun 2009 dengan target 87,09% tercapai sebesar 91,22%, tahun 2010 dengan target 86,82% dan tercapai sebesar 87,25%, tahun 2011 dengan target 87,25% dan tercapai sebesar 92,64%, tahun 2012 dengan target 93,04% dan tercapai sebesar 93,04%, dan pada tahun 2013 dengan target 90,53% dan tercapai 91,16%. Sedangkan pada tahun anggaran 2007, 2008, 2014 dan 2015, realisasi anggaran tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2007 dengan target 96% tercapai sebesar 91,99%, tahun 2008 dari target 95,81% hanya dapat terealisasi sebesar 91,27%, pada tahun 2014 dari target 91% hanya dapat terealisasi sebesar 88,07%, dan pada tahun 2015 dari target 91,5% hanya dapat terealisasi sebesar 89,60%.

Pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2015, realisasi anggaran mencapai alokasi belanja murni namun belum mampu mencapai alokasi belanja daerah perubahan. Menurut Lestari (2015:4) jika alokasi anggaran belanja murni rendah, kuasa pengguna anggaran

cenderung menaikannya pada saat anggaran perubahan. Hal ini mengakibatkan masih banyak anggaran yang tidak mampu terserap, bahkan masih dibawah alokasi belanja murni. Pada tahun 2007, 2008, dan tahun 2014 realisasi anggaran Kabupaten Bandung masih dibawah alokasi anggaran belanja murni. Hal ini menunjukkan bahwa malakukan perubahan pada alokasi belanja bukanlah hal yang wajib dilakukan.

Realisasi anggaran menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran murni dan anggaran perubahan yang dibuat seharusnya mampu terserap dengan optimal. Namun, rata-rata realisasi anggaran masih dibawah 95%. Hal ini menimbulkan masalah besar apabila pemerintahan Kabupaten Bandung tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal. Masalah yang timbul salah satunya dapat berupa tidak terpenuhinya asumsi pertumbuhan ekonomi. Perumusan anggaran merupakan masalah penting dalam sistem pemerintahan, karena berujung pada pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan publik. Sisa anggaran yang tidak dibelanjakan juga seharusnya dapat menutupi kegiatan yang strategis dan bernilai guna.

Realisasi anggaran menjadi hal yang penting diakhir tahun anggaran bagi pemerintah daerah, karena hal tersebut merupakan isu penting menyangkut tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada pemerintah. Karena itu, realisasi anggaran dari tahun ke tahun menjadi sorotan penting, baik oleh masyarakat maupun media. Hal ini dikarenakan realisasi secara tidak langsung menjadi alat ukur kinerja pemerintahan. Realisasi anggaran rendah dipengaruhi oleh alokasi belanja murni yang rendah, hal ini dikarenakan rendahnya alokasi belanja murni menyebabkan tingginya alokasi belanja perubahan. Di lain sisi, alokasi belanja perubahan yang tinggi menyebabkan rendahnya realisasi anggaran.

Masih rendahnya daya serap anggaran belanja daerah dalam APBD menjadi permasalahan yang harus diselesaikan karena APBD dikelola belum optimal seperti harapan publik. Berdasarkan fenomena yang telah dibahas di atas, maka penulis menganggap penting dilakukan penelitian lebih lanjut tentang problematika di atas dengan judul **“Pengaruh Alokasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Pada Tahun 2007-2015”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, observasi awal dan berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran yang masih kurang efektif serta terjadinya fluktuasi realisasi anggaran dibuktikan dengan realisasi anggaran yang belum maksimal karena belum tercapainya target realisasi yang telah ditentukan dalam beberapa tahun anggaran.
2. Realisasi anggaran Kabupaten Bandung tahun 2007, 2008, 2014 dan tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan adanya beberapa kegiatan pada SKPD yang tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu.
3. Dalam alokasi belanja daerah, setiap tahunnya dilakukan efisiensi-efisiensi anggaran pada SKPD namun tidak berpengaruh pada pencapaian kinerja.
4. Pada alokasi belanja daerah perubahan tahun 2014, walaupun tingkat kenaikan anggarannya paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,25% dari alokasi belanja murni, namun realisasinya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Realisasi anggaran yang rendah dipengaruhi oleh alokasi belanja daerah, baik itu alokasi belanja daerah murni yang rendah, hal ini dikarenakan rendahnya alokasi belanja murni menyebabkan tingginya alokasi belanja perubahan.
6. Karena keterbatasan data yang diberikan oleh instansi tempat penulis mencari data, menyebabkan penulis hanya bisa meneliti data selama sembilan tahun anggaran yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Sehingga hasil penelitian ini hanya mencakup sembilan tahun anggaran saja.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besaran pengaruh alokasi belanja daerah murni terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015?
2. Berapa besaran pengaruh alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015?
3. Berapa besaran pengaruh alokasi belanja daerah murni dan alokasi belanja daerah perubahan secara simultan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disusun suatu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh alokasi belanja daerah murni terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

2. Untuk mengetahui besaran pengaruh alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh alokasi belanja daerah murni dan alokasi belanja daerah perubahan secara simultan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik, terutama mengenai alokasi belanja daerah dan realisasi anggaran.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Penulis

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan alokasi belanja daerah dan realisasi anggaran.

- 2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem penganggaran setiap tahunnya dan mengekspektasi realisasi yang dapat dicapai sehingga anggaran yang dianggarkan dapat terserap dengan maksimal sesuai dengan rencana anggaran setiap tahunnya.

3) Untuk Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada analogi dan penelitian-penelitian terdahulu dengan penyesuaian teori-teori yang berlaku bahwa alokasi belanja daerah dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu realisasi anggaran.

Realisasi anggaran menurut Halim (2016:92) adalah pencapaian suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu. Untuk menghitung besaran realisasi anggaran, dapat menggunakan rumus:

$$\frac{RB}{ABP} \times 100$$

Dimana:

RB = Realisasi Belanja

ABP = Anggaran Belanja Perubahan

Realisasi anggaran yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran adalah alokasi belanja daerah, baik itu alokasi belanja daerah murni maupun alokasi belanja daerah perubahan.

Menurut Rachim (2015:44) alokasi belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk menghitung alokasi belanja daerah menggunakan rumus:

$$\frac{(ABM_t - ABP_{t-1})}{ABP_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

ABM_t = Anggaran Belanja Murni (tahun anggaran)

ABP_{t-1} = Anggaran Belanja Perubahan (tahun anggaran sebelumnya)

Menurut Wildavsky (dalam Rachim, 2015: 45) *rebudgeting*/alokasi belanja perubahan adalah revisi pemerintah dan *update* terhadap anggaran selama satu tahun anggaran. Untuk menghitung alokasi belanja daerah perubahan, menggunakan rumus:

Dimana:

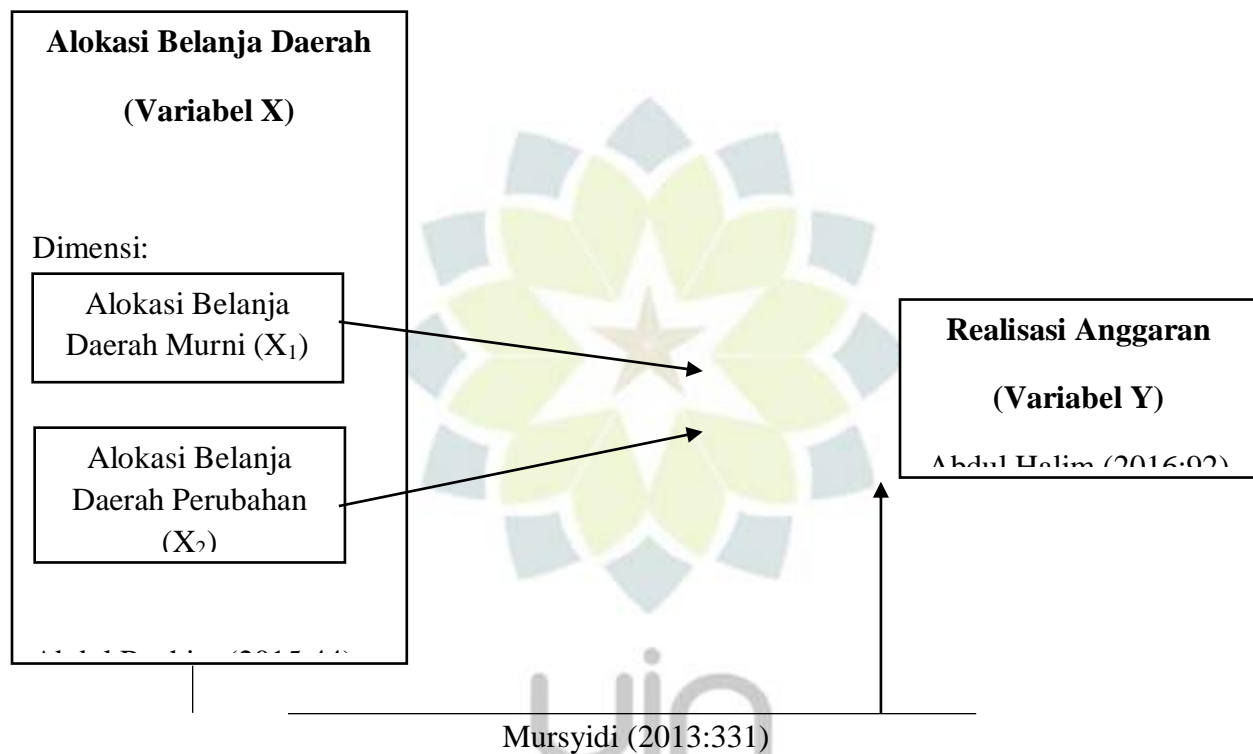
$$\frac{(ABP - ABM)}{ABM} \times 100$$

ABP = Anggaran Belanja Perubahan

ABM = Anggaran Belanja Murni

Pada dasarnya alokasi belanja daerah berhubungan langsung dengan realisasi anggaran dan anggaran. Menurut Mursyidi (2013:311), semakin besarnya alokasi belanja daerah maka akan semakin besar realisasi anggaran, dan anggaran belanja daerah akan disajikan sebagai pengeluaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam LRA, anggaran belanja terutama anggaran belanja perubahan akan disandingkan dengan besaran realisasi dalam satu tahun anggaran.

Adapun untuk skema dan variabel-variabel penelitian pada gambar 1.1 pengaruh alokasi belanja daerah murni dan alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015, sebagai berikut:



Gambar 1.1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Anggara (2015:70) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Adapun hipotesis variabel alokasi belanja daerah murni (X_1) dan alokasi belanja daerah perubahan (X_2) terhadap realisasi anggaran (Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama:

H_{o1} : Tidak ada pengaruh antara alokasi belanja daerah murni terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

H_{a1} : Ada pengaruh antara alokasi belanja daerah murni terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

2. Hipotesis Kedua:

H_{o2} : Tidak ada pengaruh antara alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

H_{a2} : Ada pengaruh antara alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

3. Hipotesis Ketiga:

Ho₃ : Tidak ada pengaruh secara simultan antara alokasi belanja daerah murni dan alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

Ha₃ : Ada pengaruh secara simultan antara alokasi belanja daerah murni dan alokasi belanja daerah perubahan terhadap realisasi anggaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007-2015.

